

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI DPR RI maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Launching* aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Juli 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SIMDA Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dalam perjalanannya, SIMDA Desa berubah nama menjadi SisKeuDes dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia.

Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa dengan tujuan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/1 D412015, tanggal 06 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya aplikasi SISKEUDES ini juga merupakan kesepakatan kerjasama antara Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahun 2016 pemerintah desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mulai menerapkan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi SisKeuDes. Aplikasi sistem keuangan desa pada pelaksanaannya masih sarat akan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan data.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi SisKeuDes yang telah diterapkan di desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi SisKeuDes (Studi Kasus di Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi SisKeuDes Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 ?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada Penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) yang dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan semua kegiatan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Data penelitian yang digunakan adalah data tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) pada desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan Penerapan tentang penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) di desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan dan penerapan tentang SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya didesa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

3. Manfaat bagi Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang teori dan konsep Evaluasi, desa dan pengelolaan keuangan desa serta SISKEUDES itu sendiri yang digunakan penulis sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari peneliian dan saran yang akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.